

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk meningkatkan pertumbuhannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar ekonomi diharapkan untuk mampu terus tumbuh dan berkembang agar mampu melakukan persaingan di era yang semakin terbuka

Menurut (Hailing & Hayden, 2006) kekuatan sistem perbankan menjadi suatu syarat penting untuk memastikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Bank menjadi bagian utama dari sektor keuangan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, bank merupakan salah satu Lembaga keuangan milik pemerintah yang memiliki peran penting dalam perekonomian setiap negara yang dikenal sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) dan sebagai jantung perekonomian suatu negara

Peran penting perbankan dalam mendukung perekonomian negara menjadi salah satu alasan mengapa kinerja keuangan suatu bank selalu dikaji untuk menentukan kecukupannya. Oleh karena itu, setiap bank memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya setelah melakukan kegiatan fungsionalnya dalam jangka waktu tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan disini adalah sebagai penilaian tingkat kecukupan bank. Semua kecukupan bank adalah kemampuan bank untuk menyelesaikan tugas keuangan tipikal dan memiliki opsi untuk memenuhi komitmen secara tepat dengan cara yang sesuai dengan pedoman keuangan material.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengelolaan keuangan merupakan bagian yang selalu dimiliki setiap instansi yang berhubungan dengan keuangan. Pengelolaan keuangan bisa disebut juga sebagai manajemen keuangan, dan banyak orang yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan hanya sebagai catat mencatat keuangan secara akuntansi saja, padahal pengelolaan keuangan lebih luas dari itu. Disini bank merupakan sebuah instansi milik negara, dimana itu diurus oleh BUMN, pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada bab ke-5 pasal 15 yang berarti bank memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang

dimaksud mengatur dan menjaga ada pada ayat (1) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Pelaksanaan kewenangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam dunia perbankan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan secara rinci salah satunya terkait dengan kinerja keuangan perbankan, yang dimana itu juga terkait dengan performa sebuah bank. Terdapat beberapa permasalahan perbankan di Indonesia diantaranya yaitu disebabkan oleh depresiasi rupiah, peningkatan suku bunga, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga menyebabkan meningkatnya masalah kredit.

Dalam bidang moneter, perbankan merupakan suatu organisasi yang berperan besar dalam setiap kegiatan keuangan, karena kemampuan utama bank adalah menghimpun subsidi-subsidi yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. aset sebagai kredit, baik itu modal kerja uang muka, kredit spekulasi, dll. Bank yang memiliki kemampuan ini mengambil bagian dalam kegiatan perbaikan publik, khususnya untuk meningkatkan pembangunan keuangan dan perbaikan yang tidak memihak untuk bekerja pada kehidupan individu

Menganalisis laporan keuangan bank membantu peserta bisnis, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan lainnya mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan tidak terkecuali perbankan. Menilai kinerja keuangan bank umumnya menggunakan lima Dari segi penilaian yaitu CAMEL (permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*)). Aspek permodalan meliputi CAR (*capital adequacy ratio*), aspek aset termasuk KAP (Profitable Asset Quality), manajemen termasuk NPM (Net Profit Margin), termasuk ROA (return on assets) dan BOPO (rasio biaya operasional sebagai persentase dari pendapatan operasional), dan aspek likuiditas Termasuk LDR (Loan to Deposit Ratio).

Laporan administrasi keuangan adalah alat penting untuk mendapatkan data mengenai posisi moneter dan hasil yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan selama periode tertentu. Tingkat kecukupan bank menentukan kualitas dan keseimbangan kerangka moneter publik. Ketergantungan yayasan perbankan diperlukan dalam perekonomian. Kekuatan ini tidak hanya dilihat dari seberapa banyak uang yang tersedia untuk digunakan, tetapi juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai instrumen organisasi keuangan. Evaluasi

pelaksanaan organisasi bagi pengurus dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo menyatakan kasus pertama penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dalam waktu yang sangat cepat kasus tersebut menyebar luas ke seluruh Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk bagi seluruh masyarakat baik dari kesehatan sampai pada perekonomian. Covid-19 juga memberikan dampak bagi keuangan di seluruh dunia yang menyebabkan sulitnya masuk devisa ke Indonesia sehingga terjadi yang namanya devaluasi rupiah. Terjadi penekanan yang berlanjut pada aktivitas ekonomi di ranah ekspor yang terjadi pada ekonomi global. Adanya kebijakan PSBB, Work From Home (WFH), dan protokol kesehatan yang membatasi kegiatan orang, barang, dan jasa jadi menyebabkan resesi aktivitas ekonomi di beberapa sektor.

Pada tahun 2007 sampai 2009 sesuai pada Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, Bank DKI mendapat predikat sehat dan metode yang digunakan metode CAMEL. Dalam hal ini kinerja keuangan ditinjau dari rasio keuangan bank yang menunjukkan suatu bank mampu memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, hal ini menjadi tidak efisien dalam penanganan risiko usaha dan dari tahun ke tahun kinerja Bank DKI mengalami peningkatan yang baik

Di saat kondisi Covid-19 yang sedang berlangsung, Bank DKI tetap menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya, agar kondisi di Indonesia saat ini tidak berdampak pada kinerja keuangannya. Hal itu sesuai dengan Visi dari PT. Bank DKI itu sendiri adalah “Menjadi Bank Pilihan Untuk Jakarta yang Maju dan Sejahtera”. Pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang saat itu sedang berlangsung Bank DKI tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Pada bulan September 2020, total aset yang dimiliki Bank DKI sebesar Rp56,68 triliun, yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,86% dibanding periode sebelumnya, hal itu disampaikan oleh Bapak Babay Parid Wazdi selaku Direktur UMK & Usaha Syariah Bank DKI. Selain aset Dana Pihak Ketiga Bank DKI pada September 2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp.43,91 triliun. Akan tetapi pencapaian laba bersih pada bulan September 2020, mengalami penurunan menjadi Rp.401,2 miliar dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp.584 miliar. Hal itu disebabkan dengan adanya peningkatan beban pencadangan instrumen keuangan hingga September 2020. Seiring

dengan adanya implementasi PSAK 71 yang memiliki tujuan untuk menjaga kualitas aset serta untuk mengatasi adanya ketidakpastian ekonomi ke depannya.

Perekonomian mulai perlahan pulih pada tahun 2021 dari pandemi Covid-19 sehingga membuat kinerja bisnis Bank DKI mencetak laba bersih pada kuartal I-2021. Pada kuartal I tahun Bank DKI mencetak laba bersih sekitar Rp.191,60 miliar, meningkat 4,16 % dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp.183,95 miliar. Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,43%, dari yang awalnya tercatat sebesar Rp.579,67 miliar pada kuartal I 2020 berubah menjadi sebesar Rp.663,30 miliar pada kuartal I 2021. (bankdki.co.id)

Seperti diungkapkan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, bapak Herry Djufraeni, perkembangan keuntungan bersih juga mempengaruhi bunga kredit. Pada triwulan pertama 2021, Bank DKI mencatatkan perkembangan kredit sebesar 3,96% menjadi Rp33,66 triliun pada Walk 2021 dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp32,37 triliun. Meskipun demikian, Bank DKI terus melakukan berbagai upaya dan pertaruhan yang kuat untuk mencegah pertaruhan kredit bermasalah agar tidak meluas. Sosialisasi kredit dan pendukung juga dilakukan secara khusus dengan memperhatikan standar kewajaran. (bankdki.co.id)

Tabel 1.1 Data Keuangan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bersih	Total Aset
2022	698.554	78.884.853
2023	276.064	79.934.598

Sumber : Laporan Keuangan Bank DKI

Cara Bank DKI untuk meningkatkan dana retail adalah dengan memanfaatkan aplikasi JakOne Mobile yang bisa membuat calon nasabah bisa melakukan pembukaan deposito dan tabungan tanpa perlu mengunjungi kantor administrasi bank. Selain itu, JakOne Mobile juga dapat digunakan untuk melunasi tagihan dan tagihan serta berbagai jenis tagihan

Bank DKI itu sendiri tampil dengan wajah serta semangat yang selaras dengan visi mereka yaitu menjadi bank terbaik dan membanggakan dan misi sebagai bank berkinerja unggul, serta menjadi mitra yang strategis di dunia usaha, masyarakat serta menjadi andalan dari

pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi para stakeholder melalui pelayanan yang terpadu dan profesional

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya", sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian perseroan terbatas bank pembangunan Djakarta Raya PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) no. 30 tanggal 11 April 1961 yang dibuat di hadapan Ibu Eliza Pondaag S.H, seorang akuntan publik di Jakarta yang telah mendapat harapan dari Pendeta Ekuitas Republik Indonesia sehubungan dengan surat pilihan No.JA5/31/31 tanggal 11 April 1961, dan terdaftar di kantor pengadilan Jakarta no. 1274 pada tanggal 26 Juni dan selanjutnya menyatakan perluasan no. 206 negara wawasan segar tentang negara republik indonesia no. 41 pada tanggal 1 Juni 1962.

Pada Desember 2017 terdapat 72 kantor layanan Bank DKI, sedangkan terdapat 40 kantor pada pasar kelolaan PD Pasar Jaya. Bank DKI sendiri memiliki rencana ingin menambah 28 kantor layanan lagi di pasar dan sekitarnya. Maka per 29 Desember 2017 total kantor layanan Bank DKI menjadi sebanyak 252 kantor, dengan 31 kantor cabang, 71 cabang pembantu, 136 kantor kas, 5 payment point, dan 9 kantor fungsional

Maksud dan tujuan didirikannya Bank DKI demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah di segala bidang, dan juga sudah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka lebih meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada saat pendirian, pemegang saham adalah Pemda DKI Jakarta dengan total 200 saham dan 50 saham dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Poetra 1912, dan Total modal disetor adalah Rp 2,5 juta. Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi bank devisa. Pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum diubah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

Berdasarkan penyampaian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Bank DKI Pasca Pandemi Covid 19 Dengan Metode CAMEL”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan untuk penelitian yang dirumuskan adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan Bank DKI pasca Covid 19 dengan menggunakan metode CAMEL ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat kinerja bank DKI pasca Covid 19 yang sempat melanda Indonesia dalam beberapa tahun

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian , yaitu :

a.. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dunia

Perbankan yang dapat membantu proses pembelajaran, pengembangan, dan

pengaplikasian yang berhubungan dengan manajemen keuangan serta sebagai bahan

kontribusi dari sisi keilmuan dan pengembangan ide penelitian yang baru.

b. Bagi Instansi, dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak

pimpinan Bank DKI untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan

dengan tingkat kesehatan bank.

c. Sebagai sebuah rujukan bagi penulis sendiri dan peneliti lain kedepannya dalam mengembangkan berbagai ide ide baru dalam penelitian lain di masa yang akan datang